

## ANGGARAN

2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2014, LD 3/TAHUN2014, 11HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BAD AN KREDIT KECAMATAN PURWOKERTO

### ABSTRAK :

- Secara umum definisi Penyertaan Modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan daerah untuk dijadikan sebagai modal BUMD. Penyertaan Modal daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada badan usaha milik daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, antara lain melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PD BPR BKK Purwokerto.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, . Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, . Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008.
- Perda ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut : Ketentuan Umum, Asas, Maksud, dan Tujuan, Penyertaan Modal, Penganggaran dan Realisasi Penyertaan Modal, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengendalian, Sanksi, Ketentuan Penutup.

### CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Mei 2014
- Peraturan Daerah sebagai syarat untuk pelaksanaan penyertaan modal daerah.